

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN NOMOR
332/PID.SUS.LH/2016/PN.PNG TENTANG *ILLEGAL LOGGING***

SKRIPSI

Oleh

Yessy Setiyowati

NIM. C93215091



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Pidana Islam

SURABAYA

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yessy Setiyowati

NIM : C93215091

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum
Pidana Islam (Jinayah)

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan
Nomor 332/Pid.Sus.LH/2016/PN.Png Tentang *Illegal
Logging*

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya
saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 8 Juli 2019

Saya yang menyatakan,



Yessy Setiyowati

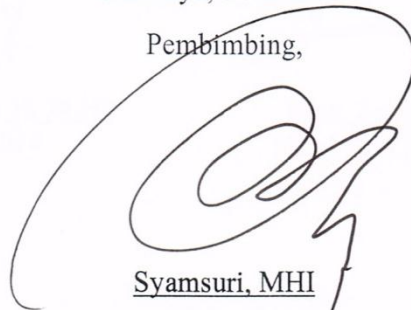
NIM. C93215091

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Yessy Setiyowati NIM.C93215091 ini telah
diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 8 Juli 2019

Pembimbing,

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Syamsuri, MHI

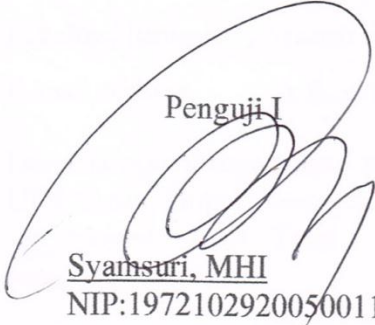
NIP. 197210292005011004

PENGESAHAN

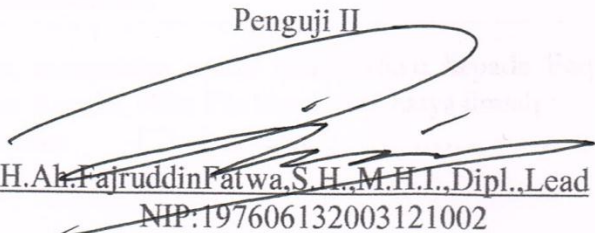
Skripsi yang ditulis oleh Yessy Setiyowati NIM C93215091 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2019 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu syariah.

Majelis Munaqosah Skripsi

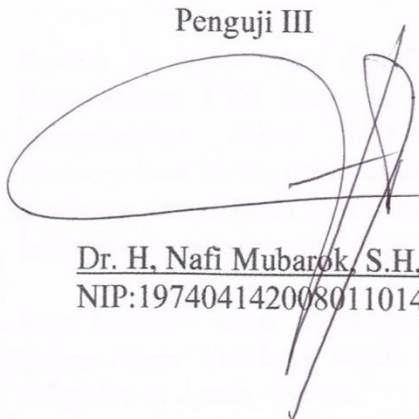
Penguji I


Syamsuri, MHI
NIP:1972102920050011004


Penguji II


H. Ak. Fajruddin Patwa, S.H., M.H.I., Dipl., Lead
NIP:197606132003121002

Penguji III


Dr. H. Nafi Mubarak, S.H., M.H.I
NIP:197404142008011014

Penguji IV


Moh. Faizur Rohman, M.H.I
NIP:198911262019031010

Surabaya, 2 Oktober 2019

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya



Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP:195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Yessy Setiyowati
NIM : C93215091
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam
E-mail address : yessysetiyowati101@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN NOMOR 332/PID.SUS-LH/2016/PN.PNG TENTANG *ILLEGAL LOGGING*.

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 03 Oktober 2019

Penulis

(Yessy Setiyowati)

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Nomor: 332/Pid.Sus.LH/2016/PN.Png)” merupakan hasil dari penelitian putusan pengadilan, yang didukung oleh kepustakaan untuk menjawab dua pertanyaan, yaitu bagaimana sanksi tindak pidana *illegal logging* dalam Putusan Nomor: 332/Pid.Sus.LH/2016/PN.Png dan bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana *illegal logging* dalam Putusan Nomor: 332/Pid.Sus.LH/2016/PN.Png.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library reaserch) dengan metode kualitatif. Pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan deskriptif analisis. Data yang digunakan berupa sebuah putusan Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor: 332/Pid.Sus.LH/2016/PN.Png sebagai data primer dan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli, dan beberapa karya tulis yang berkenaan dengan tindak pidana *illegal logging* yang kemudian dianalisis dengan teknik deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif untuk mendapat analisis khusus dalam hukum pidana Islam.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi tindak pidana *illegal logging* Pengadilan Negeri Ponorogo dalam perkara ini, hakim menjatuhkan hukuman berupa penjara 4 bulan 10 hari, karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan dalam pasal 82 ayat (1) huruf b jo Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Namun sanksi tindak pidana *illegal logging* Pengadilan Negeri Ponorogo dalam memutus perkara bagi pelaku tindak pidana *illegal logging* dalam melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin oleh pejabat yang berwenang, yang dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di sekitar kawasan hutan. Sedangkan dalam tinjauan hukum pidana Islam tindak pidana *illegal logging* yang pernah dilakukan masuk dalam *jarīmah ta'zīr*.

Dari kesimpulan di atas, pemerintah diharapkan dapat melakukan sosialisasi terhadap dampak dari kerusakan hutan kepada masyarakat dan aparat penegak hukum untuk aktif dalam menjaga dan melindungi hutan. Dan hukuman bagi pelaku *illegal logging* harus mempunyai efek jera bagi pelaku, agar tidak mengulangi perbuatannya lagi.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah	6
C. Batasan Masalah	7
D. Rumusan Masalah	7
E. Kajian Pustaka	7
F. Tujuan Penelitian	9
G. Kegunaan Hasil Penelitian	10
H. Definisi Operasional	10
I. Metode Penelitian	11
J. Sistematika Pembahasan	15
BAB II <i>JARIMAH TA'ZĪR</i> DALAM TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI TINDAK PIDANA <i>ILLEGAL LOGGING</i>	17
A. Pengertian Tindak Pidana atau <i>Jarīmah</i>	17
B. <i>Jarīmah Ta'zīr</i>	18
C. Unsur-Unsur <i>Jarīmah Ta'zīr</i>	28
BAB III DESKRIPSI KASUS SANKSI TINDAK PIDANA <i>ILLEGAL LOGGING</i> DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR: 332/PID.SUS.LH/2016/PN.PNG	29
A. Deskripsi Kasus	29
B. Keterangan Saksi-Saksi	31

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hutan yaitu suatu daerah tertentu yang tanahnya ditumbuhi pepohonan dan merupakan suatu bagian dari alam. Hutan mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dalam menunjang pembangunan bangsa dan negara. Hal ini disebabkan hutan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat indonesia.¹

Menurut pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 tahun 2013, Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya.²

Hutan merupakan sumber daya yang sangat penting tidak hanya sebagai sumber daya kayu, tetapi lebih sebagai salah satu bagian komponen lingkungan hidup.³ Sehingga hutan Indonesia merupakan salah satu pusat keanekaragaman hayati di dunia, dimana Indonesia merupakan urutan ketiga dari ketujuh Negara yang disebut Megadiversity Country.

¹Salim H.S, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, (Jakarta: Sinar Grafika 1997), 1.

²Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

³Siswanto Sunarso, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian sengketa*, (Jakarta: Rineka Cipta), 6.

Banyak upaya berupa larangan dan ancaman hukumannya yang ditetapkan oleh pemerintah bagi seseorang atau badan hukum yang melakukan pelanggaran berupa penggunaan kawasan hutan tanpa izin. Akan tetapi masih saja sebagian manusia tidak menghiraukan larangan-larangan tersebut sehingga mereka tetap melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin. Masalah penebangan pohon merupakan masalah utama di sektor kehutanan. Penebangan hutan hanya akan mengakibatkan hutan menjadi semakin gundul. Menurut Undang-undang Nomor 18 tahun 2013,

[illegible]

Pemerintah dalam menjaga lingkungan terbukti dengan dikeluarkannya peraturan yang mengatur masalah lingkungan. Pemerintah selaku penegak hukum mengeluarkan kebijakan mengenai permasalahan kehutanan berupa Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dan kemudian mengalami perubahan hingga sekarang muncul Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 juga menetapkan sanksi minimum dan maksimum terhadap orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindakan pelanggaran terhadap hukum kehutanan. Jika melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah maka akan dikenai sanksi pidana atau sanksi denda dan sanksi administratif.

Para pelaku tindak pidana *illegal logging* dapat dijerat hukum berupa dakwaan berdasarkan ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Pelaku tindak pidana *illegal logging* dapat juga dikenakan delik pencurian berdasarkan ketentuan

[illegible]

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ
يَرْجِعُونَ

Artinya: Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan Karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).⁸

Ayat tersebut menjelaskan secara tegas dampak dari merusak alam tanpa menjaga ekosistem yang ada hanya akan dapat menimbulkan bencana yang dapat merugikan manusia, namun dampak kerusakan ini akan berakibat pada lingkungan.

[illegible]

B. Identifikasi Masalah

1. Tindak pidana *Illegal Logging* dalam putusan 332/Pid.Sus.LH/2016/PN Png dalam perspektif hukum positif
2. Sanksi pidana terhadap pelaku *Illegal Logging* dalam perspektif hukum pidana islam
3. Tinjauan hukum pidana islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Nomor: 332/Pid.Sus.LH/2016/PN Png tentang *Illegal Logging*.

[illegible]

1. Penelitian yang disusun oleh Machrus Afandi yang berjudul “Hukuman Bagi Pelaku Pembalakan Liar Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2015/PN.Ktb). skripsi ini membahas tentang hukuman bagi pelaku pembalakan liar ditinjau dari hukum pidana islam dan hukum positif.¹⁰
2. Penelitian yang disusun oleh Bagus Riyan Ardiyansyah yang berjudul “Analisis Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif Terhadap Tindak Pidana Pengangkutan Hasil Hutan Tanpa Izin (studi putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 23/Pid.Sus-LH/2018/PN Kla) skripsi ini membahas tentang analisis hukum pidana islam dan hukum positif terhadap putusan tindak pidana pengangkutan hasil hutan tanpa izin.¹¹

Dari beberapa uraian judul penelitian di atas, di sini penulis ingin menunjukkan bahwa pembahasan dalam judul skripsi ini berbeda dengan pembahasan beberapa judul skripsi di atas. Bahwa fokus pembahasan skripsi

¹¹Bagus Riyan Ardiyansyah, “*Analisis Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif Terhadap Tindak Pidana Pengangkutan Hasil Hutan Tanpa Izin* (studi putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 23/Pid.Sus-LH/2018/PN Kla)” (Skripsi-UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018).

ini lebih mengkaji tentang tinjauan hukum pidana islam terhadap tindak pidana *Illegal Logging*.

Disini penulis lebih mengkaji ke hukum pidana islam tentang tindak pidana *Illegal Logging* tersebut dalam putusan Nomor 332/Pid.Sus.LH/2016/PN.Png.

Letak perbedaan pembahasan penelitian ini dengan pembahasan skripsi terdahulu yaitu skripsi ini menggunakan studi putusan yang membahas mengenai tindak pidana *Illegal Logging* dan meninjau dari segi hukum pidana Islam. Sedangkan letak persamaan dengan skripsi terdahulu yaitu sama-sama membahas mengenai tindak pidana perusakan hutan pada umumnya.

F. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah yang ditulis diatas, maka skripsi ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana sanksi tindak pidana *Illegal Logging* dalam putusan nomor 332/Pid.Sus.LH/2016/PN.Png tentang *Illegal Logging*.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana *Illegal Logging* dalam putusan nomor 332/Pid.Sus.LH/2016/PN.Png.

H. Definisi Operasional

memahami judul skripsi ini, maka perlu dijelaskan beberapa istilah-istilah atau kata-kata di dalam judul tersebut :

1. Hukum pidana Islam adalah analisis dari kacamata ketentuan-ketentuan hukum pidana Islam, hukum yang mengatur perbuatan yang dilarang

- ## I. Metodologi Penelitian

1. Data yang Dikumpulkan

¹⁴Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 18.

- ### 3. Teknik Pengumpulan Data

a. Dokumentasi, yaitu teknik mencari data dengan cara menelaah dokumen dalam hal ini adalah putusan Pengadilan Negeri Nomor: 332/Pid.Sus.LH/2016/PN Png

- 1) Alie Yafie, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, Bogor: PT Kharisma Ilmu,
- 2) Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 2005,
- 3) Aziz Syamsuddin, Tindak Pidana Khusus, Jakarta: Sinar Grafika, 2011,

Grafika, 2011,

4. Teknik Analisis Data

Penelitian data skripsi ini menggunakan teknik analisa dis

analisis dengan pola pikir deduktif, yaitu teknik analisa dengan memaparkan data apa adanya. Dalam hal ini data tentang hukum tindak pidana *illegal logging* dalam putusan Nomor 332/Pid.Sus.LH/2016/PN Png kemudian dianalisa menggunakan hukum pidana islam dalam hal ini teori hukuman *ta'zīr*. Kemudian pola pikir deduktif adalah pola pikir yang berangkat dari variabel yang bersifat umum dalam hal ini teori *jarīmah ta'zīr* kemudian diaplikasikan kepada variabel yang bersifat khusus dalam hal ini tindak pidana *illegal logging* dalam putusan Nomor 332/Pid.Sus.LH/2016/PN Png.

Penelitian ini membutuhkan pembahasan yang sistematis agar lebih mudah dalam memahami dalam penulisan skripsi. Oleh karena itu, penulis akan menyusun penelitian ini ke dalam 5 (lima) bab pembahasan. Adapun sistematika pembahasan skripsi tersebut secara umum adalah sebagai berikut:

Bab II, bab ini akan mengemukakan tentang teori *ta'zīr* yang meliputi pengertian *jarīmah ta'zīr*, dasar hukum *ta'zīr*, macam-macam *jarīmah ta'zīr*, Unsur-unsur *ta'zīr*.

Bab IV, bab ini mengemukakan analisa tinjauan hukum pidana islam tentang sanksi tindak pidana *Illegal Logging* dan pandangan hukum pidana Islam terhadap direktori putusan Pengadilan Negeri 332/Pid.Sus.LH/2016/PN.Png tentang *Illegal Logging*.

JARIMAH TA'ZIR DALAM TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI TINDAK PIDANA *ILLEGAL LOGGING*

Jarīmah berasal dari kata (جَرَمَ) yang sinonimnya (كَسَبَ وَقَطَعَ) yang artinya berusaha dan bekerja. Pengertian usaha yang dimaksud khusus untuk usaha yang tidak baik atau usaha yang dibenci oleh manusia. Maka dapat diartikan bahwa *jarīmah* adalah melakukan setiap perbuatan yang menyimpang dari kebenaran, keadilan, dan jalan yang lurus (agama). Menurut istilah Imam Al-Mawardi mengemukakan bahwa *jarīmah* adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *syara'* yang diancam dengan hukuman *hadd* atau *ta'zir*.¹

مَحْظُورَاتُ شَرِيعَةٍ زَجَرَ اللَّهُ عَنْهَا بِحَدِّ أَوْ تَعْزِيرٍ

Dalam Hukum Pidana Islam sering disebut dalam fikih dengan istilah jinayah atau *jarīmah*. Jinayah merupakan bentuk verbal noun (masdar) dari kata jana. Secara etimologi jana berarti berbuat dosa atau salah, sedangkan

²A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), 11

Menurut Makhrus Munajat jinayah merupakan suatu tindakan yang dilarang oleh syara' karena dapat menimbulkan bahaya bagi jiwa, harta, keturunan, dan akal. Sebagian *fuqaha* menggunakan kata jinayah untuk perbuatan yang berkaitan dengan jiwa atau anggota badan.⁴

1. Pengertian *Jarīmah Ta'zīr*

³Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Jogjakarta: Logung Pustaka, 2004), 1.

⁴Ibid., 2.

⁵Zainuddin Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 129.

Ta'zīr menurut bahasa adalah mashdar (kata dasar) bagi *azzara* yang berarti menolak dan mencegah kejahatan, juga berarti menguatkan, memuliakan, membantu. Dalam al-Qur'an disebutkan:

لَتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا

Artinya: Supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan (agama)Nya, membesarkan-Nya. Dan bertasbih kepada-Nya di waktu pagi dan petang. (QS. Al-Fath: 9)⁶

Menurut istilah *ta'zīr* didefinisikan oleh Al-Mawardi sebagai berikut. *Ta'zīr* adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa (maksiat) yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara',⁷ (seperangkat peraturan berdasarkan ketentuan Allah tentang tingkah laku manusia yang diyakini berlaku serta mengikat untuk semua umat yang beragama islam) dan menjadi kekuasaan ulil al-amr atau hakim.

Jarīmah ta'zīr adalah kejahatan-kejahatan yang bentuknya ditentukan oleh Ulul Amri tetapi sesuai atau tidak bertentangan dengan nilai-nilai, prinsip-prinsip dan tujuan syariah.⁸

Ta'zīr dalam syariat adalah tindakan edukatif terhadap perbuatan dosa yang tidak ada *hadd* atau *kafarah*. Dengan ini hukuman secara edukatif yang ditetapkan oleh hakim atau suatu tindakan pidana atau kemaksiatan yang hukumnya tidak ditentukan oleh pembuat syariat, atau tindak pidana yang ada hukumannya tetapi syarat-syarat pelaksanaannya tidak terpenuhi.

⁶Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan...*, 838.

⁷Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 249.

⁸A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 159.

Dalam hukum Islam, hukuman *ta'zīr* terbagi menjadi beberapa macam. Pada pembahasan ini akan disebutkan beberapa hukuman *ta'zīr* yang terpenting yang telah ditetapkan oleh hukum Islam. Selain itu, harus diingat bahwa prinsip-prinsip hukum Islam tidak menolak untuk mengambil hukuman lain apa pun juga yang dapat mewujudkan tujuan hukuman dalam hukum Islam. Hukuman-hukuman *ta'zīr* antara lain sebagai berikut:

Pada dasarnya, hukuman *ta'zīr* menurut hukum Islam bertujuan untuk mendidik. Hukuman *ta'zīr* diperbolehkan untuk memberikan pengajaran dan tidak sampai merusak atau membinasakan. Karena itu, tidak boleh ada hukuman mati atau pemotongan anggota badan dalam hukuman *ta'zīr*.

Sebagian besar *fuqaha* memberikan pengecualian dari aturan umum tersebut, yaitu memperbolehkan penjatuhan hukuman mati sebagai hukuman *ta'zīr* manakala kemaslahatan umum menghendaki demikian atau kerusakan yang diakibatkan oleh pelaku tidak bisa ditolak kecuali dengan jalan membunuhnya, seperti menjatuhkan

[illegible]

b. Hukuman Jilid (Dera)

Dari para kalangan *fuqaha* berbeda pendapat dalam menetapkan batas tertinggi hukuman dera dalam tindak pidana *ta'zīr*. Menurut pendapat yang populer dalam madzhab Maliki, penentuan batas tertinggi diserahkan kepada penguasa karena hukuman *ta'zīr* didasarkan pada kemaslahatan masyarakat dan atas dasar berat ringannya tindak pidana sehingga penguasa dapat melakukan ijtihad. Sementara itu, Imam Abu Hanifah dan Muhammad berpendapat bahwa batas tertinggi hukuman dera dalam tindak pidana *ta'zīr* adalah 39 kali, sedangkan menurut Abu Yusuf sebanyak 75 kali.

¹²Alic Yafie. *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT Kharisma Ilmu), 87.

c. Hukuman Kawalan (Penjara Kurungan)

Ada dua macam hukuman kawalan dalam hukum Islam, yaitu pertama, hukuman kawalan terbatas waktunya. Batas terendah hukuman ini ialah satu hari, sedangkan batas tertinggi tidak ada kesepakatan di antara *fuqaha*. Sebagaimana ulama berpendapat bahwa batas tertingginya tidak lebih dari enam bulan, sebagian yang lain berpendapat bahwa tidak lebih dari satu tahun dan sebagian yang lain berpendapat bahwa batas tertinggi diserahkan kepada penguasa. Kedua, hukuman kawalan tidak terbatas. Telah disepakati oleh para *fuqaha* bahwa orang yang dikenai hukuman kurungan tidak terbatas ini adalah orang yang berbahaya, orang yang terbiasa melakukan tindak pidana. Dalam hukuman kurungan tidak terbatas, terhukum terus dikurung sampai ia menampakkan tobat dan baik pribadinya atau sampai ia mati.¹⁴

¹⁴Ibid., 92.

d. Hukuman Pengasingan

Menurut Abu Hanifah hukuman pengasingan adalah hukuman *ta'zīr*, sedangkan imam madzhab lain memandangnya sebagai *ḥudūd*. Adapun untuk selain tindak pidana zina, telah disepakati bahwa hukuman pengasingan adalah hukuman *ta'zīr* jika perbuatan pelaku merugikan orang lain.

Menurut sebagian ulama Syafi'i dan Hambali, masa pengasingan dalam tindak pidana *ta'zīr* tidak boleh lebih dari satu tahun. Alasan mereka, hukuman pengasingan dalam tindak pidana zina gair muhsan adalah hukuman hudud yang masanya satu tahun. Karena itu, hukuman pengasingan sebagai hukuman *ta'zīr* tidak boleh melebihi batas satu tahun ini.

Imam abu Hanifah berpendapat bahwa masa pembuangan bisa lebih dari satu tahun karena ia tidak menganggap hukuman pengasingan sebagai hukuman *ḥudūd*, tetapi sebagai hukuman *ta'zīr*. Adapun Imam Malik berpendapat bahwa merupakan sesuatu yang memungkinkan untuk menambah masa pembuangan dari satu tahun walaupun ia tetap menerima hukuman pembuangan sebagai hukuman *ḥudūd*, sebab menurutnya, hadis tersebut telah dibatalkan (mansukh). Adapun juga *fuqaha* yang berpendapat bahwa masa hukuman pengasingan boleh lebih dari satu tahun, mereka tidak memberikan batas waktu tertentu.

[illegible]

dicuri. Disamping itu hukuman bagi orang yang menyembunyikan barang yang hilang dapat dikenai hukuman yang sama juga.¹⁷

C. Unsur-Unsur *Jarīmah Ta'zīr*

Suatu perbuatan dianggap *jarīmah* bila unsur-unsurnya telah terpenuhi syarat dan rukun. Jika dikategorikan menjadi 2 (dua) yaitu pertama, unsur umum yang artinya unsur-unsur yang harus terpenuhi pada setiap *jarīmah*. Kedua, unsur khusus yang artinya unsur yang terpenuhi pada jenis *jarīmah* tertentu dan berbeda antara *jarīmah* yang satu dengan *jarīmah* yang lainnya. Akan tetapi adapun yang termasuk dalam unsur umum *jarīmah* yaitu:

1. Unsur Formil

Adalah setiap perbuatan tidak dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dipidana kecuali adanya nas atau undang-undang yang mengaturnya.

2. Unsur Materiil

Adalah adanya tingkah laku seseorang yang membentuk *jarīmah*, baik dengan sikap berbuat maupun sikap tidak berbuat.

3. Unsur Moral

Adalah pelaku *jarīmah* yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap *jarīmah* yang dilakukannya.¹⁸

¹⁷Ibid., 101.

¹⁸Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Jogjakarta: Logung Pustaka, 2004), 10.

**DESKRIPSI KASUS SANKSI TINDAK PIDANA *ILLEGAL LOGGING*
DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR
332/PID.SUS.LH/2016/PN.PNG**

Dari kronologi tindak pidana *illegal logging* di Pengadilan Negeri Ponorogo, bahwa terdakwa Pada hari minggu tanggal 07 Agustus 2016 sekitar pukul 12.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Dukuh Jurugan Rt. 02 Rw. 01 Desa Karang Patihan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo yang berwenang memeriksa dan mengadili,¹ telah melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam atau sekitar kawasan hutan.²

¹Data ditulis berdasarkan berkas “Putusan Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor:332/Pid.Sus-LH/2016/PN.Png”.

² Ibid., 3.

Terdakwa, saksi Supriyanto, saksi Mulyono, saksi Basori telah mengambil kayu jati dari kawasan hutan di petak 93i dan petak 94 RPH Centong BKPH Pulung masuk Dukuh Jurugan, Desa Karang Patihan. Ketika terdakwa mengambil kayu tersebut dengan cara pohon kayu yang masih berdiri terdakwa potong dengan menggunakan gergaji, setelah pohon kayu jati roboh ranting-ranting pohon kayu jati tersebut oleh terdakwa dipotong dengan sabit dan kemudian terdakwa potong pohon kayu jati tersebut menjadi 4 (empat) bagian, kemudian oleh terdakwa kulit kayu jati dihilangkan menggunakan prekul yang juga bermata ganco sampai berbentuk balok dan kemudian terdakwa bawa pulang kayu-kayu jati tersebut dengan cara dipangkul dan di simpan di dalam rumah terdakwa.³

[illegible]

1. Saksi Supriyanto bin Suwardi

- a. pada hari minggu tanggal 07 Agustus 2016 sekitar jam 19.00 WIB , saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumah terdakwa Dukuh Jurugan Rt. 02 Rw. 01 Desa Karang Patihan Kec. Pulung. Kab. Ponorogo. Mengenai perkara terdakwa menebang dan menyimpan kayu jati dari hutan tanpa dokumen yang sah. Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama-sama dengan saksi Suyono, saksi Mulyono, dan satu regu dari Polsek Pulung. Kayu jati yang ditemukan di rumah terdakwa sudah berbentuk papan, balok dan reng dengan rincian ukuran:

- 3 (tiga) lembar ukuran 200cm x 23cm x 15cm = 0,207m

- 3 (tiga) batang ukuran 220cm x 15cm x 7cm = 0,0693m

- 3 (tiga) batang ukuran 210cm x 15cm x 7cm = 0,06615m

[illegible]

- 25 (dua puluh lima) batang ukuran 100cm x 2cm x 4cm = 0,02m
- 17 (tujuh belas) batang ukuran 220cm x 2cm x 4cm = 0,02992m
- 18 (delapan belas) batang ukuran 200cm x 2cm x 4cm = 0,0288m
- 24 (dua puluh empat) batang ukuran 130cm x 2cm x 4cm = 0,02496m
- 17 (tujuh belas) batang ukuran 200cm x 2cm x 4cm = 0,0272m
- 7 (tujuh) batang ukuran 16cm x 2cm x 4cm = 0,00896m.

[illegible]

2. Saksi Mulyono bin Kabul

- Kayu jati bentuk papan:

- Kayu jati bentuk balok:

- [illegible]

- Kayu jati dalam bentuk reng:

- Perbedaan kayu jati dari kawasan hutan berwarna coklat tua, pori-pori kayu lebih padat dan cenderung lurus karena dirawat, sedangkan kayu jati kampung warnanya coklat muda pori-pori kayu tidak padat. Pada saat ditanyakan kepada terdakwa tentang asal dan surat yang sah dari kayu jati yang terdakwa simpan, terdakwa tidak bisa menunjukkan dan terdakwa menyatakan kayu jati yang terdakwa simpan sebagian terdakwa ambil dari hutan. Kemudian terdakwa menunjukkan lokasi tempat dimana terdakwa menebang pohon di dalam kawasan

3. Saksi Basori bin Miskun

- ### C. Barang Bukti

- ⁵Data ditulis berdasarkan berkas “Putusan Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor: 332/Pid.Sus-LH/2016/PN.Png”, ... 5-9.

1. Keterangan Terdakwa

[illegible]

menyimpan kayu jati dari hutan tanpa dokumen yang sah. Tersebut ditangkap oleh pihak perhutani dan pihak polsek pulung. Karena pada bulan Januari 2016 terdakwa mengambil kayu jati dari kawasan hutan sebanyak 1 (satu) pohon dan kemudian dipotong menjadi 2 bagian dan kemudian dipotong. Kemudian terdakwa mengambil kayu jati tersebut dari kawasan hutan di petak 93i dan petak 94 RPH Centong BKPH Pulung Dukuh Jurugan, Desa Karang Patihan. Bahwa kayu jati tersebut terdakwa simpan di dalam rumah terdakwa, untuk mengambil kayu jati tersebut terdakwa menggunakan alat berupa gergaji tangan, kapak, pemotong kayu, prekul dan juga bermata ganco untuk mengkilatkan kulit kayu jati dan sabit untuk memotong ranting dan alat-alat tersebut.

Berdasarkan uraian fakta-fakta hukum diatas yang unsur-unsurnya telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa yaitu dakwaan tunggal yang sebagaimana diatur dalam pasal 82 ayat (1) huruf b jo Pasal 82 ayat (2) Jo

Berdasarkan uraian fakta-fakta hukum diatas yang unsur-unsurnya telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa yaitu dakwaan tunggal yang sebagaimana diatur dalam pasal 82 ayat (1) huruf b jo Pasal 82 ayat (2) Jo

Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan Pemberantasan Kehutanan. Memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur “Orang Perseorangan”, bahwa yang dimaksud dengan unsur orang perseorangan dalam undang-undang a quo telah jelas disebutkan dalam pasal 1 angka 21 setiap orang adalah orang perseorangan dan atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan dalam doktrin ilmu pidana adalah setiap orang sebagai subyek hukum dalam hal ini adalah pelaku tindak pidana di mana perbuatan pelaku tersebut dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan pasal 44 KUHP. Bahwa dalam dakwaan Penuntut Umum tercantum identitas Terdakwa yaitu Bambang Wiyono Bin Tukiran dan setelah diperiksa di persidangan identitas tersebut telah cocok dan sesuai, sehat jasmani dan rohani dibuktikan terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan Majelis Hakim serta Terdakwa termasuk orang yang cakap berbuat hukum atau dapat mempertanggung jawabkan perbuatan hukumnya.
2. Unsur “Yang dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang”, bahwa dalam elemen unsur ini mensyaratkan adanya “kesengajaan” dimana dalam doktrin ilmu pidana mengenai kesengajaan adalah “dengan sengaja” dalam unsur ini merujuk pada konsep “kesengajaan” (*schuld*) yang secara umum pengertiannya meliputi arti

dan perkataan: “menghendaki” (*willen*) dan “mengetahui” (*wetens*) atau dalam arti lain “sengaja” adalah kemampuan kesadaran untuk menginsyafi apa yang dilakukan dan akibat-akibat yang mungkin timbul oleh karenanya serta kesadaran keinsyafan dari sifat melawan hukum atas perbuatannya. Bahwa kesengajaan terjadi apabila suatu perbuatan telah timbulnya pelaksanaan dan atau persiapan dari suatu perbuatan tersebut. Bahwa fakta dan keadaan hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar, bahwa terdakwa telah memiliki kemampuan kesadaran untuk menginsyafi atau menyadari apa yang dilakukan dan akibat-akibat yang mungkin timbul oleh karenanya serta kesadaran keinsyafan dari sifat melawan hukum atas perbuatannya, selain itu atas perbuatan terdakwa sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum telah terungkap adanya pelaksanaan dan telah selesainya perbuatan terdakwa sebagaimana uraian perbuatan terdakwa pada fakta dan keadaan hukum pada pertimbangan putusan *a quo* di atas. Bahwa dalam fakta hukum terungkap. Bahwa benar Pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2016 sekira jam 19.00 WIB terdakwa ditangkap di rumah terdakwa Dukuh Jurugan Rt. 02 Rw. 01 Desa Karang Patihan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo - Bahwa benar terdakwa ditangkap karena menebang dan menyimpan kayu jati dari hutan tanpa dokumen yang sah. Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh pihak perhutani dan dari pihak Polsek Pulung. Bahwa benar pada bulan Januari 2016 terdakwa mengambil kayu jati dari kawasan hutan

sebanyak 1 (satu) pohon dan kemudian dipotong menjadi 2 (dua) potong. Bahwa benar terdakwa menebang satu pohon kayu jati pada tahun 2015, dan kemudian pohon tersebut dipotong dan kemudian dibelah-belah sesuai keinginan terdakwa. Bahwa benar terdakwa mengambil kayu jati tersebut dari kawasan hutan di petak 93i dan petak 94 RPH Centong BKPH Pulung masuk Dukuh Jurugan, Desa Karang Patihan. Bahwa benar kayu jati tersebut terdakwa simpan di dalam rumah terdakwa. Bahwa benar untuk mengambil kayu tersebut terdakwa menggunakan alat berupa gergaji tangan untuk memotong kayu, prekul dan juga bermata ganco untuk menghilangkan kulit kayu jati dan sabit untuk memotong ranting dan alat-alat tersebut semua milik terdakwa. Terdakwa mengambil kayu tersebut dengan cara pohon kayu yang masih berdiri terdakwa potong dengan menggunakan gergaji, setelah pohon kayu jati roboh ranting-ranting pohon kayu jati tersebut oleh terdakwa dipotong dengan menggunakan sabit dan kemudian terdakwa potong pohon kayu jati tersebut menjadi 2 bagian, Kemudian oleh terdakwa kulit kayu jati dihilangkan dengan menggunakan prekul yang juga bermata ganco sampai berbentuk balok dan kemudian terdakwa bawa pulang kayu-kayu jati tersebut dengan cara terdakwa pangkul dan terdakwa simpan di dalam rumah terdakwa. Jarak rumah terdakwa dengan tempat menebang pohon sekitar 2 kilometer. Rumah terdakwa bersebelahan dengan hutan perhutani, terdakwa tinggal di kawasan sekitar hutan. Kemudian terdakwa menggarap tanah milik

3. Unsur “Dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan atau di sekitar kawasan hutan”, terdakwa mengambil kayu tersebut dengan cara pohon kayu yang masih berdiri terdakwa potong dengan menggunakan gergaji, setelah pohon kayu jati roboh ranting-ranting pohon kayu jati tersebut oleh terdakwa dipotong dengan menggunakan sabit dan kemudian terdakwa potong pohon kayu jati tersebut menjadi 2 bagian, kemudian oleh terdakwa kulit kayu jati dihilangkan dengan menggunakan prekul yang juga bermata ganco sampai berbentuk balok dan kemudian terdakwa bawa pulang kayu-kayu jati tersebut dengan cara terdakwa pangkul dan terdakwa simpan di dalam rumah terdakwa. Jarak rumah terdakwa dengan tempat menebang pohon sekitar 2 kilometer, rumah terdakwa bersebelahan dengan hutan

3. Unsur “Dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan atau di sekitar kawasan hutan”, terdakwa mengambil kayu tersebut dengan cara pohon kayu yang masih berdiri terdakwa potong dengan menggunakan gergaji, setelah pohon kayu jati roboh ranting-ranting pohon kayu jati tersebut oleh terdakwa dipotong dengan menggunakan sabit dan kemudian terdakwa potong pohon kayu jati tersebut menjadi 2 bagian, kemudian oleh terdakwa kulit kayu jati dihilangkan dengan menggunakan prekul yang juga bermata ganco sampai berbentuk balok dan kemudian terdakwa bawa pulang kayu-kayu jati tersebut dengan cara terdakwa pangkul dan terdakwa simpan di dalam rumah terdakwa. Jarak rumah terdakwa dengan tempat menebang pohon sekitar 2 kilometer, rumah terdakwa bersebelahan dengan hutan

Sebelum menjatuhkan putusan, sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa yaitu antara lain:

Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan *Illegal Logging*.

Dalam perkara ini terdakwa mengaku terus terang atas perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan, terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya. Di dalam persidangan terdakwa bersikap sopan dan terdakwa juga belum pernah dihukum sebelumnya. Serta terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dalam mencari nafkah.⁸

⁸ Ibid., 18.

- Dirampas untuk Negara ;**

- d. 1 (satu) buah gergaji tangan merk probek
- e. 1 (satu) buah prekul bermata dua (ganco)
- f. 1 (satu) buah sabit

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah)⁹

⁹ Ibid., 20

**ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI TINDAK
PIDANA *ILLEGAL LOGGING* DALAM PUTUSAN NOMOR
332/PID.SUS.LH/2016/PN.PNG**

Di dalam peradilan pidana di Indonesia dikenal 2 (Dua) jenis tindak pidana, yaitu tindak pidana umum dan pidana khusus. Tindak pidana tersebut mempunyai peraturan undang-undang masing-masing. Tindak pidana umum diatur dalam KUHP atau yang lebih kita kenal dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana.Sedangkan tindak pidana khusus diatur dalam peraturan undang-undang yang bersifat khusus.Misal undang-undang tindak pidana korupsi dan undang-undang khusus lainnya.

Dalam putusan Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 332/Pid.Sus.LH/2016/PN.Png tentang *illegal logging* yang dilakukan oleh terdakwa Bambang Wiyono Bin Tukiran, adapun sanksi yang dijatuhi oleh hakim yaitu:

1. Menimbang bahwa unsur dari Pasal 82 ayat (1) huruf b jo Pasal 82 ayat (2) Jo Pasal 12 huruf b tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah terpenuhi, maka terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan.
2. Bahwa dipersidangan majelis hakim tidak menemukan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana baik alasan pembeda dan

undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pembasmi Hama dan Penyakit Hutan. Karena sesuai dengan pemeriksaan sidan dan pemeriksaan di lapangan, maka dapat disimpulkan bahwa undang tersebut dapat dipertimbangkan unsur sebagai berikut:

a. Unsur “Orang Perseorangan”, bahwa yang dimaksud dengan orang perseorangan dalam undang-undang a quo telah jelas diartikan dalam pasal 1 angka 21 setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan atau berakibat kerusakan di wilayah hukum Indonesia dan dalam doktrin ilmu pidana ada orang sebagai subyek hukum dalam hal ini adalah pelaku tindak pidana di mana perbuatan pelaku tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pembasmi Hama dan Penyakit Hutan. Karena sesuai dengan pemeriksaan sidan dan pemeriksaan di lapangan, maka dapat disimpulkan bahwa undang tersebut dapat dipertimbangkan unsur sebagai berikut:

a. Unsur “Orang Perseorangan”, bahwa yang dimaksud dengan orang perseorangan dalam undang-undang a quo telah jelas diartikan dalam pasal 1 angka 21 setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan atau berakibat kerusakan di wilayah hukum Indonesia dan dalam doktrin ilmu pidana ada orang sebagai subyek hukum dalam hal ini adalah pelaku tindak pidana di mana perbuatan pelaku tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pembasmi Hama dan Penyakit Hutan. Karena sesuai dengan pemeriksaan sidan dan pemeriksaan di lapangan, maka dapat disimpulkan bahwa undang tersebut dapat dipertimbangkan unsur sebagai berikut:

a. Unsur “Orang Perseorangan”, bahwa yang dimaksud dengan orang perseorangan dalam undang-undang a quo telah jelas diartikan dalam pasal 1 angka 21 setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan atau berakibat kerusakan di wilayah hukum Indonesia dan dalam doktrin ilmu pidana ada orang sebagai subyek hukum dalam hal ini adalah pelaku tindak pidana di mana perbuatan pelaku tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

- b. Unsur “Yang dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang”, bahwa dalam elemen unsur ini mensyaratkan adanya “kesengajaan” dimana dalam doktrin ilmu pidana mengenai kesengajaan adalah “dengan sengaja” dalam unsur ini merujuk pada konsep “kesengajaan” (*schuld*) yang secara umum pengertiannya meliputi arti dan perkataan: “menghendaki” (*willen*) dan “mengetahui” (*wetens*) atau dalam arti lain “sengaja” adalah kemampuan kesadaran untuk menginsyafi apa yang dilakukan dan akibat-akibat yang mungkin timbul oleh karenanya serta kesadaran keinsyafan dari sifat melawan hukum atas perbuatannya. Bahwa kesengajaan terjadi apabila suatu perbuatan telah timbulnya pelaksanaan dan atau persiapan dari suatu perbuatan tersebut. Fakta dan keadaan hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar, bahwa terdakwa telah memiliki kemampuan kesadaran untuk menginsyafi atau menyadari apa yang dilakukan dan akibat-akibat yang mungkin timbul oleh karenanya serta kesadaran keinsyafan dari sifat melawan hukum atas perbuatannya, selain itu atas perbuatan terdakwa sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum telah terungkap adanya pelaksanaan dan telah selesainya perbuatan terdakwa sebagaimana uraian perbuatan terdakwa pada fakta dan keadaan hukum pada pertimbangan putusan *a quo* di atas. Bahwa dalam fakta hukum terungkap benar Pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2016 sekira jam 19.00 WIB terdakwa ditangkap di

rumah terdakwa Dukuh Jurugan Rt. 02 Rw. 01 Desa Karang Patihan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo. Bahwa benar terdakwa ditangkap karena menebang dan menyimpan kayu jati dari hutan tanpa dokumen yang sah. Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh pihak perhutani dan dari pihak Polsek Pulung. Namun pada bulan Januari 2016 terdakwa mengambil kayu jati dari kawasan hutan sebanyak 1 (satu) pohon dan kemudian dipotong menjadi 2 (dua) potong. Bahwa benar terdakwa menebang satu pohon kayu jati pada tahun 2015, dan kemudian pohon tersebut dipotong dan kemudian dibelah-belah sesuai keinginan terdakwa. Bahwa benar terdakwa mengambil kayu jati tersebut dari kawasan hutan di petak 93i dan petak 94 RPH Centong BKPH Pulung masuk Dukuh Jurugan, Desa Karang Patihan. Bahwa benar kayu jati tersebut terdakwa simpan di dalam rumah terdakwa. Untuk mengambil kayu tersebut terdakwa menggunakan alat berupa gergaji tangan untuk memotong kayu, prekul dan juga bermata ganco untuk menghilangkan kulit kayu jati dan sabit untuk memotong ranting dan alat-alat tersebut semua milik terdakwa. Terdakwa mengambil kayu tersebut dengan cara pohon kayu yang masih berdiri terdakwa potong dengan menggunakan gergaji, setelah pohon kayu jati roboh ranting-ranting pohon kayu jati tersebut oleh terdakwa dipotong dengan menggunakan sabit dan kemudian terdakwa potong pohon kayu jati tersebut menjadi 2 bagian, Kemudian oleh terdakwa kulit kayu jati dihilangkan dengan menggunakan prekul yang juga bermata ganco

c. Unsur “Dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan atau di sekitar kawasan hutan”, terdakwa mengambil kayu tersebut dengan cara pohon kayu yang masih berdiri terdakwa potong dengan menggunakan gergaji, setelah pohon kayu jati roboh ranting-ranting pohon kayu jati tersebut oleh terdakwa dipotong dengan menggunakan sabit dan kemudian terdakwa potong pohon kayu jati

d. Menimbang bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan *Illegal Logging*.

Dalam perkara ini terdakwa mengaku terus terang atas perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan, terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya. Di dalam persidangan terdakwa bersikap sopan dan terdakwa juga belum pernah

[illegible]

Menurut uraian tersebut, penulis memiliki pendapat yaitu Berdasarkan pidana yang dijatuhkan oleh pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana *illegal logging*, hakim menjatuhkan pidana sesuai unsur-unsur diatas, perbuatan terdakwa jelas bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dan mengingat pasal 82 ayat (1) huruf b jo pasal 82 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 ancaman sudah ditentukan, yaitu pidana penjara 4 (empat) bulan 10 (sepuluh) hari.

Dari analisa diatas berdasarkan unsur-unsur perbuatan pidana maka sangat jelas bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana *illegal logging*. Akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa maka ketentuan pasal 82 ayat (1) huruf b jo pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 diterapkan terhadap terdakwa.

[illegible]

yang mengalami kerugian secara langsung karena tidak bisa menikmati anugerah Allah berupa kekayaan alam secara maksimal. Di dalam islam kejahatan *illegal logging* ini termasuk dalam kategori *jarīm* karena unsur-unsur *jarīmah hadd* dan *qisās* diyat tidak terpenuhi sempurna, ataupun karena adanya unsur yang masih dianggap *syubḥ*. Sebagaimana telah dikemukakan bahwa sanksi *ta'zīr* dengan tindak pidana *ta'zīr* yang meliputi tiga macam yaitu *pertama* pidana *ḥudūd* atau *qisās* tetapi tidak memenuhi syarat untuk diberikan hukuman *had* atau *qisās*, seperti percobaan pencurian, perzinahan dan pembunuhan. *Kedua*, kejahatan-kejahatan yang disebutkan sanksinya. Sanksinya diserahkan kepada pemerintah (umum) seperti penipuan, saksi palsu, perjudian, penghinaan, dan lain sebagainya.

yang mengalami kerugian secara langsung karena tidak bisa menikmati anugerah Allah berupa kekayaan alam secara maksimal. Di dalam islam kejahatan *illegal logging* ini termasuk dalam kategori *jarīm* karena unsur-unsur *jarīmah hadd* dan *qisās* diyat tidak terpenuhi sempurna, ataupun karena adanya unsur yang masih dianggap *syubḥ*. Sebagaimana telah dikemukakan bahwa sanksi *ta'zīr* dengan tindak pidana *ta'zīr* yang meliputi tiga macam yaitu *pertama* pidana *ḥudūd* atau *qisās* tetapi tidak memenuhi syarat untuk diberikan hukuman *had* atau *qisās*, seperti percobaan pencurian, perzinahan dan pembunuhan. *Kedua*, kejahatan-kejahatan yang disebutkan sanksinya. Sanksinya diserahkan kepada pemerintah (umum) seperti penipuan, saksi palsu, perjudian, penghinaan, dan lain sebagainya.

yang mengalami kerugian secara langsung karena tidak bisa menikmati anugerah Allah berupa kekayaan alam secara maksimal. Di dalam islam kejahatan *illegal logging* ini termasuk dalam kategori *jarīm* karena unsur-unsur *jarīmah hadd* dan *qisās* diyat tidak terpenuhi sempurna, ataupun karena adanya unsur yang masih dianggap *syubḥ*.

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa sanksi *ta'zīr* dengan tindak pidana *ta'zīr* yang meliputi tiga macam yaitu *pertama* pidana *ḥudūd* atau *qisās* tetapi tidak memenuhi syarat untuk diberikan hukuman *ḥad* atau *qisās*, seperti percobaan pencurian, perzinahan dan pembunuhan. *Kedua*, kejahatan-kejahatan yang disebutkan sanksinya. Sanksinya diserahkan kepada pemerintah (umum) seperti penipuan, saksi palsu, perjudian, penghinaan, dan lain sebagainya.

yang mengalami kerugian secara langsung karena tidak bisa menikmati anugerah Allah berupa kekayaan alam secara maksimal. Di dalam Islam kejahatan *illegal logging* ini termasuk dalam kategori *jarīm* karena unsur-unsur *jarīmah hadd* dan *qisās* diyat tidak terpenuhi sempurna, ataupun karena adanya unsur yang masih dianggap *syubḥ*.

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa sanksi *ta'zīr* dengan tindak pidana *ta'zīr* yang meliputi tiga macam yaitu *pertama* pidana *ḥudūd* atau *qisās* tetapi tidak memenuhi syarat untuk diberikan hukuman *ḥad* atau *qisās*, seperti percobaan pencurian, perzinahan dan pembunuhan. *Kedua*, kejahatan-kejahatan yang disebutkan sanksinya. Sanksinya diserahkan kepada pemerintah (umum) seperti penipuan, saksi palsu, perjudian, penghinaan, dan lain sebagainya.

yang mengalami kerugian secara langsung karena tidak bisa menikmati anugerah Allah berupa kekayaan alam secara maksimal. Di dalam islam kejahatan *illegal logging* ini termasuk dalam kategori *jarīm* karena unsur-unsur *jarīmah hadd* dan *qisās* diyat tidak terpenuhi sempurna, ataupun karena adanya unsur yang masih dianggap *syubḥ*.

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa sanksi *ta'zīr* dengan tindak pidana *ta'zīr* yang meliputi tiga macam yaitu *pertama* pidana *ḥudūd* atau *qisās* tetapi tidak memenuhi syarat untuk diberikan hukuman *had* atau *qisās*, seperti percobaan pencurian, perzinahan dan pembunuhan. *Kedua*, kejahatan-kejahatan yang disebutkan sanksinya. Sanksinya diserahkan kepada pemerintah (umum) seperti penipuan, saksi palsu, perjudian, penghinaan, dan lain sebagainya.

Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 82 ayat (2) yang berbunyi:

[illegible]

Jarīmah ta'zīr sebagai hukuman yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap Allah dan hambanya yang tidak ditentukan Al-Qur'an dan Hadis. *Ta'zīr* memberikan fungsi pengajaran kepada si terhukum dan mencegahnya untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi. Sebagian mengatakan sebagai hukuman terhadap perbuatan maksiat yang tidak dihukum dengan hukuman had atau kafarat. *Ta'zīr* merupakan tindak pidana yang bentuk dan ancaman hukumnya ditentukan oleh penguasa sebagai pelajaran bagi pelakunya sehingga dapat dikatakan bahwa hukum *ta'zīr* menjadi wewenang penguasa untuk menentukannya.⁴

⁴ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 140-141.

Dalam perkara ini hukuman *ta'zīr* yang pantas diterima oleh Bambang Wiyono bin Tukiran adalah hukuman *ta'zīr* berupa penjara kurungan. Hukuman ini termasuk sebagai kekuasaan ulil amri demi untuk kemaslahatan rakyatnya.

[illegible]

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberi saran, memberikan perlindungan bagi masyarakat sudah sepatutnya aparat penegak hukum yang memiliki jiwa keadilan khususnya dalam hal ini majelis hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana agar mempertimbangkan kerugian yang dialami oleh negara, agar tercapainya penegakan hukum memberikan efek jera dan agar tidak melakukan tindak pidana yang sama.

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberi saran, memberikan perlindungan bagi masyarakat sudah sepatutnya aparat penegak hukum yang memiliki jiwa keadilan khususnya dalam hal ini majelis hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana agar mempertimbangkan kerugian yang dialami oleh negara, agar tercapainya penegakan hukum memberikan efek jera dan agar tidak melakukan tindak pidana yang sama.

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberi saran, memberikan perlindungan bagi masyarakat sudah sepatutnya aparat penegak hukum yang memiliki jiwa keadilan khususnya dalam hal ini majelis dalam menjatuhkan sanksi pidana agar mempertimbangkan kerugian yang dialami oleh negara, agar tercapainya penegakan hukum memberikan efek jera dan agar tidak melakukan tindak pidana yang sama.

